

TAJUK RENCANA

Harapan Baru Pekerja

KABAR gembira mendadak datang bagaikan 'durian runtuh' untuk para buruh atau pekerja berpenghasilan di bawah Rp 5 juta perbulan. Kabar itu datang dari Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, bahwa pemerintah akan memberikan insentif berupa *cash transfer* kepada mereka Rp 600.000 perorang perbulan, selama empat bulan. Totalnya, setiap buruh akan menerima Rp 2.400.000.

Insentif tersebut dimaksud untuk meringankan beban para pekerja akibat pandemi Covid-19. Namun, mekanisme penyalurannya masih dalam tahap kajian finalisasi, apakah langsung diberikan dalam satu waktu atau bertahap. Untuk keperluan insentif tersebut, anggaran yang harus disiapkan pemerintah mencapai Rp 31 triliun dan hanya akan diberikan kepada 13,8 juta pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta perbulan.

Menteri BUMN Erick Thohir selaku Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, menyebut insentif tersebut merupakan bantuan langsung tunai (BLT). Juga disebutkan bahwa insentif ini merupakan bagian dari stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional dalam menanggulangi dampak Covid-19.

Bantuan difokuskan kepada 13,8 juta pekerja non-PNS dan non-BUMN yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, de-

ngan iuran di bawah Rp 150.000 perbulan atau setara dengan gaji di bawah Rp 5 juta perbulan. Bantuan selama empat bulan akan langsung diberikan perdua bulan ke rekening masing-masing pekerja, agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam penyalurannya.

Bantuan akan diberikan empat bulan sekaligus, setiap bulan atau setiap dua bulan, tentu ini merupakan harapan baru untuk para buruh yang akan menerima insentif tersebut. Yang perlu diwaspadai adalah, dampak dari insentif yang 'hanya' diberikan kepada 13,8 juta pekerja. Hal itu mengingat (menurut data) saat ini ada sekitar 52,2 juta pekerja sektor formal. Dari jumlah tersebut, 2,8 juta buruh di antaranya terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) karena dampak Covid-19.

Kita harus banyak belajar dari pengalaman selama ini, bahwa penyaluran BLT dan bantuan sejenis lainnya dari pemerintah selama ini selalu menimbulkan kegaduhan, baik di lingkungan masyarakat maupun pelaksana teknis pemberian bantuan tersebut. Banyak pihak yang merasa berhak mendapat bantuan, namun tidak dapat. Ada pula pihak-pihak yang menganggap ada ketidakberesan dalam pembagian bantuan. Juga sangat mungkin, ada oknum yang sengaja memanfaatkan 'peluang empuk' dalam mekanisme penyaluran bantuan pemerintah selama ini. □

PENEGAKAN supremasi hukum di republik yang menyatakan diri dalam konstitusi sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) ramai memperbincangkan ditangkapnya buron kelas kakap Djoko Tjandra. Penangkapan buron selama 11 tahun ini juga mengungkap keraguan. Di medsos sempat terbacca : *begitu mudahnya Bareskrim Mabes Polri menangkap terpidana dinegara lain (baca : Malaysia) kemudian membawanya kembali ke Indonesia..*

Meski kemudian dijelaskan Kabareskrim Komjend Pol Listyo Sigit, penangkapan terpidana Djoko S Tjandra adalah hasil kerja sama (*police to police*) antara Kepolisian RI dengan Kepolisian Negara Diraja Malaysia. Namun sejatinya pertanyaan itu akan berlanjut. *"Jika demikian mudahnya kenapa untuk menangkap seorang terpidana yang buron harus menunggu sampai 11 tahun? Lalu bagaimana dengan buron kelas kakap lainnya yang juga diduga telah melakukan perbuatan melanggar hukum pidana dan kemudian kabur keluar negeri seperti Eddy Tanzil dan lainnya?"*

Hanya ada beberapa problem hukum yang bisa dikaji lebih mendalam oleh pakar hukum pidana mengenai status Djoko Tjandra. Pertama, saat ini sudah bukan lagi sebagai Warga Negara Indonesia karena sudah memiliki paspor dan telah menjadi warga Negara Papua Nugini. Kedua, yang aneh selama terpidana, buron bisa kembali ke Indonesia bahkan bisa mengurus E-KTP dan surat jalan ke luar negeri serta kelengkapan lainnya. Bukan sudah memegang paspor PNG?

Telah Diputus

Dalam supremasi hukum, perkara Djoko S Tjandra telah diputus ditingkat terakhir perkara yakni Putusan Kasasi No. 1688 K/Pid.Sus/2000 tanggal 28 juni 2001 jo Putusan PN Jakarta Selatan

Achiel Suyanto S

No156/Pid.B/2000/PN.Jkt.Sel tgl 28-8-2000. Kemudian telah diajukan permohonan peninjauan kembali (PK) yang dalam hukum pidana disebut 'herzeinning' oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pertanyaannya, apakah ini salah? Tidak! Hanya saja, aturan hukum acara Pidana yang masih berlaku di Negara

mintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Jadi, dari bunyi secara *letterlijke* ketentuan pasal tersebut, yang bisa dan dibolehkan mengajukan permohonan PK hanyalah terpidana dan atau ahli warisnya/keluarganya.

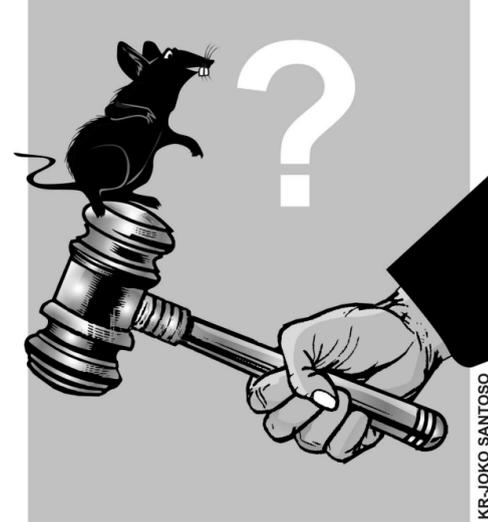
Memang terhadap ketentuan pasal ini oleh JPU sering dialihkan. Ketika dibaca dari bunyi pasal tersebut tidak kata-kata : *jaksa dilarang mengajukan PK.* Dalih yang tidak keliru. Tetapi jika semua ketentuan aturan perundangan yang tidak menyebutkan tegas kata-kata 'dilarang' selalu diartikan 'boleh' atau 'tidak dilarang', sistem penegakan hukum dan kepastian hukum pasti tidak akan tercapai atau dapat ditegakkan. Padahal tujuan hukum ada 3 tujuan : keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

Tidak Dapat

Jadi secara hukum, putusan PK Mahkamah Agung RI No. 12 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009 adalah putusan yang 'non eksekutabel' alias tidak dapat dijalankan eksekusinya. Karena sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi RI No33/PUU-XIV/2016 bahwa Putusan seperti tersebut terqualifikasi sebagai putusan yang inkonstitusional.

Pertanyaan mendasar dari konstruksi hukum sedemikian itu adalah, mau dibawa kemana penegakan hukum di negara kita? □

**) Dr Achiel Suyanto S, Ketua Bidang Hukum dan HAM ICMI Orwil*



KR-JOKO SANTOSO

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinkr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Filantropi, PKK dan Kampanye Pakai Masker

FILANTROPI berasal dari kata Yunani yakni *philein* berarti cinta, dan *anthropos* berarti manusia. Bila dirangkai menjadi filantropi, kata tersebut memiliki makna cinta kasih pada sesama. Mendalami makna tersebut, kegiatan filantropi tak hanya sekadar urusan materi.

Setidaknya ada dua hal yang diberikan sebagai bentuk kepedulian kita pada sesama. Pertama ide dan pikiran, kedua tenaga. Filantropi dapat dilakukan pemerintah maupun swasta ataupun perseorangan. Hal ini telah dilakukan di Indonesia termasuk dalam masa pandemi Covid-19. Suatu situasi yang sangat kompleks, yang penanganannya bukan persoalan mudah.

Direktur Eksekutif Filantropi Indonesia, Hamid Abidin menyatakan, filantropi ibarat anggur lama dalam botol baru. Tapi praktiknya sudah dilakukan ratusan tahun yang lalu. Filantropi bagian dari ajaran keagamaan dan tradisi/budaya yang berkaitan dengan keermawanan. Ajaran agama seperti zakat, sedekah, kolekte, tradisi masyarakat seperti patungan, jimpitan. Kegiatan filantropi tidak melalui materi, tetapi bisa tenaga, pikiran dan waktu.

Semangat

Data menunjukkan, masa pandemi, semangat filantropi untuk membantu sesama sesuai dengan karakter bangsa. Bantuan APD, uang tunai, kebutuhan bahan pokok, menyelenggarakan atau membantu karantina mandiri dan sebagainya, telah dilakukan di seluruh negeri. Upaya-upaya promotif, preventif dan kuratif telah banyak dilakukan. Namun Gugus Tugas setiap hari melaporkan makin meningkatnya kasus positif.

Semua kepala daerah, termasuk Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, menekankan perlunya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat melaksanakan protokol kesehatan. Presiden Djoko Widodo memerintahkan

IM Sunarsih

ajarannya untuk segera melakukan kampanye masif pakai masker dalam dua pekan ke depan sebagai upaya menekan penyebaran covid-19.

Case recovery rate di Indonesia sudah sampai 61,9% semakin baik, diharapkan terus meningkat angkanya. Presiden ingin agar protokol kesehatan tidak hanya sebatas pengetahuan yang difahami, tetapi sampai dengan adanya perubahan sikap dan perubahan perilaku di kalangan masyarakat. Dimulai dengan pemakaian masker, kemudian cuci tangan, jaga jarak dan jangan berkerumun. Presiden ingin melibatkan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) yang dipandang mampu untuk membantu pelaksanaan kampanye tersebut.

Dalam menghadapi situasi ini, peran serta masyarakat dan kerja sama dengan pemerintah menjadi kunci dalam penanganan wabah korona. Semua unsur masyarakat harus membantu, sosialisasi dan edukasi menjadi hal yang penting. Edukasi yang masif pasti akan membantu masyarakat dalam memahami apa dan bagaimana pencegahan pandemi Covid-19. Peran serta perempuan menjadi garda terdepan atau palang pintu bagi anggota keluarga dalam membentengi diri. Agar tidak terpapar virus.

Dasa Wisma

PKK mempunyai program terkait dengan kesehatan dan mempunyai struktur dari nasional, provinsi, kabupaten kota sampai dasa wisma. Jalur ini dapat dipakai sebagai jalur informasi protokol kesehatan dalam menghadapi penularan Covid-19. PKK di-

pandang paling strategis untuk dapat melakukan edukasi ke masyarakat, karena dapat bersentuhan langsung dengan keluarga.

Diharapkan peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku melakukan protokol kesehatan antara lain memakai masker diperhitungkan akan berhasil bila PKK melaksanakan. Saat ini komunikasi antarwarga dapat dilakukan dengan cepat melalui WhatsApp, hampir semua RT/RW mempunyai grup WhatsApp. Edukasi atau kampanye masif dapat dilakukan lebih cepat berupa ajakan dari mulut ke mulut melalui WhatsApp.

PKK mempunyai peran strategis, efektif dan efisien dalam mengubah perilaku masyarakat untuk memakai masker serta protokol kesehatan yang lain. Agar memutus rantai penularan Covid-19 dengan melakukan kampanye masif dan menyapa masyarakat. Ini merupakan suatu tindakan nyata perilaku filantropi, kasih sayang untuk sesama. □

**) Dr Dra IM Sunarsih SU Apt, Penasehat TP PKK DIY, Wakil Ketua I YKI Cabang DIY*

Pojok KR

Tujuh wisatawan sedang di Pantai Goa Cemara menjadi korban keganasan ombak. -- **Korban lagi!**

Pemberian insentif untuk pekerja Rp 2,4 juta perorang perbulan harus jelas. -- **Jelas-jelasan?**

Pemerintah akan menghabiskan modal Rp 2,8 triliun untuk membangkitkan UMKM. -- **UMKM, lho.**

Berabe



Pikiran Pembaca

Pikiran Pembaca terbuka bagi siapa saja. Naskah dikirim ke kantor Redaksi Kedaulatan Rakyat, Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40-42 Yogyakarta 55232 Fax (0274) 563125 Telp (0274) 565685 (Hunting) atau melalui email pikiranpembaca@gmail.com. Naskah dilengkapi fotokopi atau scan identitas diri berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Isi tanggung jawab penulis.

KB dan Ternak Ayam

BELUM lama ini, tepatnya Senin (27/7), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKK-BN) melalui media daring Zoom menyelenggarakan acara sosialisasi yang mengangkat topik ternak ayam sebagai upaya peningkatan ekonomi keluarga.

Kegiatan yang diselenggarakan di Depok, Jawa Barat ini diikuti lebih 3.500 peserta terdiri masyarakat umum yang sebagian besar peserta Keluarga Berencana (KB) anggota kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UP-PKS) dan YouTube BKKBN Official. Acara ini menghadirkan narasumber Deputi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, Dr dr M Yani MKes, PKK, juga Praktisi dan Konsultan Budidaya Ayam Bagus Widiatmoko SPT serta Inisiator Kandang Portabel sekaligus Penulis Buku Peternakan dan Pertanian, Titut Wibisono.

Materi ini menjadi menarik, karena selama ini BKKBN lebih mengarahkan kelompok UPPKS pada usaha ekonomi produktif berupa produk makanan, minuman dan barang kerajinan/suvenir serta usaha perdagangan/jasa seperti membuka warung, menjahit, dan lain-lain. Sementara usaha ternak ayam yang sebenarnya masih banyak dilakukan penduduk desa belum ditangani secara serius. Padahal apabila usaha ternak ayam ini dikelola dengan baik, memiliki prospek yang sangat cerah. Setidaknya akan mampu meningkatkan pendapatan keluarga sehingga kesejahteraan meningkat.

Praktisi dan Konsultan Budidaya Ayam, Bagus Widiatmoko SPT memandang bahwa usaha ternak ayam sudah menjadi primadona bagi masyarakat di lingkup rumah tangga untuk berusaha, tetapi terkadang mereka tidak memperhatikan kondisi ayam, makanan dan lingkungannya. Padahal, sangat penting untuk memperhatikan kondisi ternak ayam agar bisa tumbuh dengan baik, menghasilkan telur dan berkambang biak dengan sehat. Oleh karena itu, beliau memberikan tips bagaimana cara menyiapkan kandang dan bibit. Dalam menyiapkan kandang, hal penting yang perlu diperhatikan antara lain, bahan kandang tidak boleh korosif dan tahan lama, usahakan membujur dari timur ke barat, posisi kandang harus lebih tinggi dari sekitar dan didesain untuk mudah dibersihkan. Selain itu, pastikan sirkulasi udara baik, buat ukuran kandang sesuai kapasitas dan disarankan menggunakan tipe *close house*.

Sementara itu, Titut Wibisono, Inisiator Kandang Portabel mengungkapkan bahwa saat ini masih banyak orang yang mengeluhkan mengenai ketersediaan lahan untuk kandang ternak ayam, karena kondisi rumah yang sudah padat penduduk menjadi permasalahan utama. Untuk itu, beliau memberikan solusi berupa kandang portabel yang bisa digunakan secara mobile dan dipindah-pindah.

Drs Mardiyu, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas PMD Dalduk dan KB Kabupaten Kulonprogo.

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945. Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktor Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurika Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSoS.

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro: **Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Semarang :** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP.

Banyuwangi : Jalan Prof Moh Yamin No 5, Purwokerto, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto. **Klaten :** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti.

Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha. **Kulonprogo :** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.

Kedaulatan Rakyat

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. **Romy Sugiantoro SPd, SE, MM. Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussenahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afiaty, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Drs Sihono HT, Agung Purwardono. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grasis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijayanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting) **Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrkyk23@yahoo.com, iklankrkyk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu' Rp 65.000,00, Iklan Umum/Display..Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris). Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm . Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300% dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%